

IMPLEMENTASI KETUNDUKAN ORANG KRISTEN KEPADA PEMERINTAH BERDASARKAN ROMA 13:1–5 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Medin Tumanggor¹

¹Sekolah Tinggi Teologi Kingdom Bali

Korespondensi : medintumanggor2016@gmail.com

Abstract

*This study examines the implementation of Christian submission to government based on Romans 13:1–5 in the context of national and civic life in Indonesia. The relationship between church and state remains a significant theological issue because Scripture commands believers to submit to governing authorities while also recognizing situations in which governmental commands may conflict with God's will. **This research employs a qualitative library research method with an exegetical approach to Romans 13:1–5. The analysis considers the historical, grammatical, and theological context of the passage and is supported by scholarly literature and previous academic studies. The findings indicate that government is an institution ordained by God to maintain public order, uphold justice, and punish wrongdoing. Therefore, submission to governing authorities is an expression of obedience to God, demonstrated through law-abiding conduct, respect for authority, responsible citizenship, tax compliance, and prayer for national leaders. Nevertheless, such submission is not absolute. Whenever governmental commands contradict God's Word, believers must obey God rather than human authorities, as affirmed in Acts 5:29. Consequently, Romans 13:1–5 presents a balanced framework that enables Christians to fulfill their responsibilities both as citizens of God's Kingdom and as responsible citizens of the state.***

Keywords: Romans 13:1–5; Government; Submission; Christians; Church and State.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketundukan orang Kristen kepada pemerintah berdasarkan Roma 13:1–5 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perdebatan mengenai hubungan gereja dan negara masih menjadi isu penting karena di satu sisi Alkitab memerintahkan orang percaya untuk tunduk kepada pemerintah, sementara di sisi lain terdapat situasi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan melalui pendekatan eksegesis terhadap Roma 13:1–5 dengan memperhatikan konteks historis, gramatikal, dan teologis serta didukung oleh berbagai literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang ditetapkan Allah untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, dan menghukum pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, ketundukan kepada pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan kepada otoritas, partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, pembayaran pajak, serta doa bagi para pemimpin negara. Namun demikian, ketundukan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, orang percaya harus mengutamakan ketaatan kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para

Rasul 5:29. Dengan demikian, implementasi Roma 13:1–5 menghasilkan keseimbangan antara tanggung jawab sebagai warga Kerajaan Allah dan warga negara yang baik.

Kata Kunci: Roma 13:1–5; Pemerintah; Ketundukan; Orang Kristen; Gereja dan Negara.

PENDAHULUAN

Hubungan antara gereja dan negara merupakan salah satu kajian penting dalam teologi Kristen. Sejak masa gereja mula-mula hingga masa kini, orang percaya menghadapi pertanyaan mengenai sejauh mana mereka harus menaati pemerintah, terutama ketika kebijakan pemerintah dipandang tidak sejalan dengan nilai moral dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Roma 13:1–5 perlu dipahami secara tepat agar orang Kristen mampu menempatkan diri sebagai warga Kerajaan Allah sekaligus sebagai warga negara.

Paulus menulis Surat Roma dalam konteks Kekaisaran Romawi. Dalam surat tersebut, ia menyatakan bahwa “tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah” (Roma 13:1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah berada dalam kedaulatan Allah dan memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Namun, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah selalu dibenarkan oleh Allah.¹

Roma 13 sering dipahami sebagai dasar ketaatan mutlak kepada pemerintah. Pemahaman tersebut kurang memperhatikan kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Dalam Kisah Para Rasul 5:29, para rasul menyatakan, “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.” Dengan demikian, ketundukan kepada pemerintah harus dipahami secara proporsional: orang Kristen menghormati dan menaati pemerintah, tetapi tetap menempatkan Allah sebagai otoritas tertinggi.²

1 Jerry L. Sumney, “Romans 13 and the Demands of Empire,” *Review & Expositor* 121, no. 3–4 (2025).

2 Priska Yasinta dan Wie Wie Chandra, “Kasih dan Takut Akan Allah sebagai Dua Pilar Sikap Patuh kepada Pemerintah: Sebuah

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Roma 13:1–5 memiliki relevansi yang besar. Orang Kristen dipanggil untuk menaati hukum, menghormati pemerintah, menjaga persatuan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, gereja memiliki fungsi profetis untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih apabila terjadi penyimpangan moral atau penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis Roma 13:1–5 melalui pendekatan eksegesis serta menjelaskan implementasinya dalam kehidupan orang Kristen di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang antara ketaatan kepada pemerintah dan kesetiaan kepada Allah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hubungan orang Kristen dan pemerintah telah dilakukan oleh banyak teolog dan peneliti. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa Roma 13:1–7 merupakan salah satu dasar penting ajaran Perjanjian Baru mengenai otoritas pemerintah. Pemerintah dipandang sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menghukum pelaku kejahatan.³

Namun, penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa Roma 13 tidak boleh

Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1–7” (2021).

3 Carleton Hafer, “Where Does Obedience to Government End? Understanding Romans 13:1–7,” *Eleutheria* 5, no. 2 (2021).

dipahami sebagai pembenaran terhadap ketaatan tanpa batas. Sumney menempatkan Roma 13 dalam konteks Kekaisaran Romawi dan menunjukkan bahwa teks tersebut perlu dibaca secara kritis agar tidak digunakan untuk melegitimasi setiap bentuk kekuasaan politik.⁴

Yasinta dan Chandra melalui pendekatan gramatika-historis menegaskan bahwa ketundukan kepada pemerintah harus dibaca dalam kerangka kasih dan takut akan Allah. Ketaatan kepada pemerintah bukanlah sikap pasif yang membenarkan segala tindakan penguasa, melainkan ketaatan yang tetap dibatasi oleh kehendak Allah.⁵

Penelitian mengenai kehidupan Kristen dalam konteks berbangsa dan bernegara juga menegaskan bahwa gereja tidak dapat memisahkan kehidupan iman dari tanggung jawab sosial. Orang Kristen dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, menjaga persatuan, menghormati hukum, dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.⁶

Kajian Sine secara khusus menghubungkan Roma 13:1–7 dengan tanggung jawab membayar pajak. Menurutnya, kewajiban membayar pajak tidak hanya memiliki dimensi sipil, tetapi juga dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab iman dalam kehidupan bersama.⁷

4 Jerry L. Sumney, "Romans 13 and the Demands of Empire," *Review & Expositor* 121, no. 3–4 (2025).

5 Priska Yasinta dan Wie Wie Chandra, "Kasih dan Takut Akan Allah sebagai Dua Pilar Sikap Patuh kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1–7" (2021).

6 "Kajian Teologis tentang Kehidupan Kristen dalam Berbangsa dan Bernegara," Garuda Kemdikbudristek, diterbitkan 26 Agustus 2021.

7 Jefri Lorens A. Sine, "Kontekstualisasi Roma 13:1–7: Tanggung Jawab Manusia

Penelitian terdahulu umumnya membahas asal-usul otoritas pemerintah, kewajiban menaati pemerintah, atau relasi gereja dan negara secara umum. Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian dengan mengintegrasikan eksegesis Roma 13:1–5 dan implementasinya dalam kehidupan orang Kristen di Indonesia yang demokratis, pluralistik, dan berdasarkan hukum.

B. Konsep Alkitabiah tentang Pemerintah

Dalam Alkitab, pemerintah dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan Allah atas dunia. Daniel 2:21 menyatakan bahwa Allah memecat raja dan mengangkat raja. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah dan pemerintahan manusia. Namun, kedaulatan Allah tidak berarti bahwa semua pemimpin selalu memerintah sesuai kehendak-Nya.

Dalam Roma 13:1, Paulus menggunakan istilah *exousia*, yang berarti otoritas, kewenangan, atau kekuasaan. Istilah tersebut menunjuk pada otoritas yang memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu tidak bersifat mutlak karena tetap berada di bawah otoritas Allah.

Roma 13:3–4 menjelaskan tujuan pemerintahan, yaitu menghargai perbuatan baik dan menghukum kejahatan. Pemerintah dipanggil untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Karena itu, pemerintah disebut sebagai "hamba Allah." Sebutan ini menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

C. Ketundukan kepada Pemerintah dalam Perspektif Paulus

Kata "tunduk" dalam Roma 13:1 berasal dari kata Yunani *hypotassō*, yang berarti menempatkan diri di bawah suatu otoritas.

sebagai Warga Negara Indonesia untuk Membayar Pajak," *Jurnal Apokalipsis* (2025).

Istilah ini menekankan sikap menghormati otoritas yang sah dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bersama. Akan tetapi, kata tersebut tidak berarti menyetujui seluruh kebijakan pemerintah.

Paulus juga menyatakan bahwa orang percaya harus tunduk “oleh karena hati nurani” (Rm. 13:5). Kata *syneidēsis* berarti hati nurani atau kesadaran moral. Ketaatan orang Kristen bukan semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga pada kesadaran iman bahwa kehidupan tertib, pembayaran pajak, pemeliharaan persatuan, dan keberanian menyuarkan kebenaran secara damai ketika pemerintah menyimpang dari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa teks Alkitab, literatur teologi, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai hubungan gereja dan negara. Penelitian kualitatif membantu penulis memahami makna teks dan relevansinya dalam konteks kehidupan sosial.⁸

Pendekatan utama yang digunakan adalah eksegesis biblikal. Eksegesis dilakukan dengan memperhatikan konteks historis, gramatikal, sastra, dan teologis Roma 13:1–5. Analisis juga memperhatikan situasi sosial-politik Kekaisaran Romawi dan hubungan perikop tersebut dengan Roma 12.

Istilah-istilah Yunani yang dianalisis meliputi *exousia* (otoritas), *hypotassō* (tunduk), *diakonos* (pelayan), *machaira* (pedang), dan *syneidēsis* (hati nurani). Analisis leksikal digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai maksud Paulus.

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

Alkitab, khususnya Roma 13:1–5 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, tesis, buku akademik, penelitian teologis, dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu 2016–2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Literatur yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kontribusinya. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis eksegetis, analisis teologis, dan analisis kontekstual.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber. Penafsiran Roma 13:1–5 dibandingkan dengan berbagai penelitian akademik dan dibaca bersama bagian Alkitab lainnya, seperti Kisah Para Rasul 5:29, 1 Timotius 2:1–2, 1 Petrus 2:13–17, Daniel 3, dan Daniel 6. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *analogia Scripturae*, yaitu menafsirkan Alkitab dengan memperhatikan kesaksian Alkitab secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Surat Roma

Surat Roma ditulis Paulus sekitar tahun 56–58 M ketika ia berada di Korintus dan bersiap menuju Yerusalem (Rm. 15:25–26). Jemaat Roma bukanlah jemaat yang didirikan langsung oleh Paulus. Melalui surat ini, Paulus menjelaskan Injil yang diberitakannya dan mempersiapkan dukungan jemaat Roma bagi pelayanan selanjutnya.

Jemaat Roma hidup dalam masyarakat yang terdiri atas orang Yahudi dan non-Yahudi serta berada di bawah pemerintahan Romawi. Oleh sebab itu, hubungan dengan pemerintah merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan jemaat.

Roma 13:1–5 tidak dapat dipisahkan dari Roma 12. Dalam Roma 12, Paulus berbicara tentang pembaruan hidup, kasih kepada sesama, kerendahan hati, perdamaian, dan larangan membalas kejahatan dengan

8 John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-5 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).

kejahatan. Roma 13 menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam hubungan orang percaya dengan pemerintah.

B. Konteks Historis Roma 13:1–5

Kekaisaran Romawi memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Pemerintah menyediakan keamanan, mengatur perdagangan, membangun jalan, dan menjaga stabilitas politik. Namun, pemerintahan Romawi juga memiliki kelemahan berupa pajak yang berat, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan praktik penyembahan kepada kaisar di beberapa wilayah.

Jemaat Roma hidup dalam situasi sosial yang plural. Perbedaan latar belakang Yahudi dan non-Yahudi dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Sikap pemberontakan terhadap pemerintah juga dapat menghambat kesaksian Injil. Karena itu, Paulus mendorong jemaat untuk hidup tertib dan menghormati pemerintah.

Paulus tidak sedang menyatakan bahwa pemerintahan Romawi sempurna. Ia menekankan fungsi pemerintahan berdasarkan mandat Allah, bukan berdasarkan kesempurnaan moral para penguasanya. Dengan demikian, yang dihormati adalah lembaga otoritasnya, bukan setiap tindakan pemerintah tanpa pengecualian.⁹

C. Eksegesis Roma 13:1–5

1. Roma 13:1

Paulus berkata, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya.” Perintah ini berlaku bagi setiap orang. Dasar ketundukan tersebut adalah bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Istilah *hypotassō* menunjuk pada tindakan menempatkan diri di bawah otoritas, sementara *exousia* menunjuk pada otoritas atau kewenangan. Paulus menegaskan bahwa pemerintahan memiliki tempat dalam tatanan

9 Stuart M. Foster, *The Reception of Romans 13:1–7 during the English Reformation* (PhD diss., University of York, 2017).

sosial yang berada di bawah kedaulatan Allah. Namun, ayat ini tidak berarti Allah menyetujui seluruh tindakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, penerapannya terlihat dalam kepatuhan terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan hukum yang sah; orang Kristen dipanggil menjadi warga negara yang membangun, bukan penyebar hoaks, ujaran kebencian, atau kekerasan.

2. Roma 13:2

Paulus menyatakan bahwa orang yang melawan pemerintah melawan ketetapan Allah dan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ini tidak dapat dipakai untuk melarang seluruh bentuk kritik terhadap pemerintah. Kritik yang bertanggung jawab, penggunaan hak politik, dan penyampaian aspirasi secara damai bukanlah pemberontakan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa para nabi menegur raja-raja yang berbuat jahat dan para rasul menolak perintah yang bertentangan dengan kehendak Allah.¹⁰ Implementasi ayat ini meliputi penolakan terhadap tindakan anarkis, kekerasan atas nama agama atau politik, dan pemberontakan yang merusak kehidupan bersama; aspirasi dan kritik hendaknya disampaikan melalui mekanisme hukum dan cara-cara yang damai.

3. Roma 13:3

Paulus menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak menjadi ancaman bagi orang yang berbuat baik, melainkan bagi orang yang melakukan kejahatan. Pemerintah memiliki fungsi normatif untuk memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Paulus tidak sedang menyatakan bahwa setiap pemerintah selalu menjalankan fungsi tersebut dengan sempurna, melainkan menggambarkan fungsi ideal pemerintah. Dengan demikian, Roma

10 Sonny Eli Zaluchu, “Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience),” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2018): 24–36.

13:3 bersifat normatif. Dalam kehidupan berbangsa, orang Kristen dipanggil menjadi warga negara yang jujur, taat hukum, menolak korupsi, menghargai hak sesama, dan ikut menciptakan kehidupan masyarakat yang damai.

4. Roma 13:4

Paulus menyebut pemerintah sebagai “hamba Allah.” Istilah Yunani yang digunakan adalah diakonos, yang berarti pelayan atau pelaksana tugas. Pemerintah bukan pemilik kuasa mutlak, melainkan penerima mandat untuk melayani masyarakat. Paulus juga menyebut bahwa pemerintah “tidak percuma menyandang pedang.” Kata *machaira* melambangkan kewenangan pemerintah untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk kekerasan yang sewenang-wenang. Bagi gereja, Roma 13:4 memberikan dua tanggung jawab, yaitu mendukung pemerintah yang menegakkan keadilan dan menjalankan fungsi profetis ketika pemerintah menyimpang; gereja tidak boleh menjadi alat propaganda kekuasaan, tetapi juga tidak boleh bersikap apatis terhadap ketidakadilan.¹¹

5. Roma 13:5

Paulus menyatakan bahwa orang percaya perlu tunduk bukan hanya karena takut terhadap hukuman, tetapi juga karena suara hati. Kata *syneidēsis* berarti hati nurani atau kesadaran moral. Orang percaya menaati hukum karena menyadari bahwa hidup tertib merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Dengan demikian, ketaatan kepada pemerintah menjadi wujud nyata kehidupan yang memuliakan Allah. Implementasi ayat ini meliputi kejujuran, pembayaran pajak,

11 Made Nopen Supriadi, Manase Gulo, dan Iman Kristina Halawa, “Theological Basis for Obedience to the Government During the Covid-19 Pandemic in Indonesia,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 5, no. 2 (2021): 213–223.

kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, tanggung jawab dalam pekerjaan, penolakan terhadap suap, dan kesediaan menghormati hak orang lain.

D. Implikasi Teologis dan Implementasi

1. Ketaatan kepada Pemerintah sebagai Ketaatan kepada Allah

Roma 13:1–5 mengajarkan bahwa menghormati pemerintah yang menjalankan fungsinya secara benar merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Dalam konteks Indonesia, orang Kristen dipanggil menaati hukum, menghormati lembaga negara, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, dan memelihara ketertiban. Pembayaran pajak dipahami bukan hanya sebagai kewajiban sipil, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan iman.¹²

2. Pemerintah sebagai Pelayan Allah

Pemerintah sebagai diakonos dipanggil untuk melayani masyarakat dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kekuasaan tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan umum. Orang Kristen dapat mendukung pemerintahan yang bersih melalui penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, partisipasi dalam pelayanan sosial, pengawasan yang etis, penolakan terhadap korupsi, dan keterlibatan dalam pembangunan.

3. Peran Gereja dalam Kehidupan Berbangsa

Gereja dipanggil membina jemaat agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Gereja harus mengajarkan doa bagi para pemimpin berdasarkan 1 Timotius 2:1–2 serta mendorong jemaat menjalankan kewajiban sosialnya. Gereja juga memiliki fungsi profetis, yaitu menyampaikan suara kebenaran berdasarkan firman Allah, yang harus dilakukan dengan kasih, sikap santun,

12 Sine, “Kontekstualisasi Roma 13:1–7.”

argumentasi yang benar, dan tanpa kekerasan.¹³13

4. Batas Ketundukan kepada Pemerintah

Ketundukan kepada pemerintah tidak bersifat mutlak karena Allah merupakan otoritas tertinggi. Dalam Daniel 3, Sadrakh, Mesakh, dan Abednego menolak menyembah patung emas. Dalam Daniel 6, Daniel tetap berdoa meskipun ada larangan dari pemerintah. Dalam Kisah Para Rasul 5:29, para rasul tetap memberitakan Injil meskipun diperintahkan untuk berhenti. Berdasarkan kesaksian tersebut, orang Kristen wajib menaati pemerintah selama perintah pemerintah tidak bertentangan dengan firman Allah. Penolakan terhadap perintah yang salah tidak boleh dilakukan melalui kekerasan, melainkan dengan hormat, damai, dan bertanggung jawab, serta bersedia menanggung konsekuensinya.¹⁴14

5. Implementasi dalam Konteks Indonesia

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Dalam konteks tersebut, orang Kristen dipanggil menjadi pembawa damai dan penjaga persatuan bangsa. Implementasi Roma 13:1–5 dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, yaitu menghormati pemerintah dan aparat negara yang menjalankan tugas sesuai hukum, menaati peraturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berpartisipasi dalam pembangunan, menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, serta mendoakan pemimpin agar memimpin dengan hikmat dan kejujuran. Orang Kristen juga dipanggil menolak korupsi, suap, penyalahgunaan kekuasaan, hoaks, ujaran kebencian,

diskriminasi, dan kekerasan. Bela negara dalam perspektif iman Kristen tidak harus dipahami sebagai tindakan militer semata, tetapi dapat diwujudkan melalui kehidupan yang jujur, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati hukum, dan melayani masyarakat.¹⁵15

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teologis dan praktis dalam kajian hubungan gereja dan negara berdasarkan Roma 13:1–5. Secara teologis, penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah berada di bawah kedaulatan Allah dan menerima mandat untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, serta menghukum pelaku kejahatan; pemerintah disebut sebagai diakonos, sehingga otoritasnya bersifat delegatif, bukan absolut. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa orang Kristen dipanggil menjadi warga negara yang taat hukum, menghormati pemerintah, aktif membangun masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa, sementara gereja tetap menjalankan fungsi profetis dengan menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih apabila pemerintah menyimpang dari mandatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksegesis terhadap Roma 13:1–5, pemerintah merupakan lembaga yang berada dalam kedaulatan Allah dan memiliki tugas memelihara ketertiban sosial, menegakkan keadilan, serta menghukum pelaku kejahatan. Karena itu, orang Kristen dipanggil untuk menghormati dan menaati pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Istilah *exousia*, *hypotassō*, *diakonos*, *machaira*, dan *syneidēsis* menunjukkan bahwa ketundukan Kristen mencakup penghormatan terhadap otoritas, kesediaan hidup tertib, pengakuan terhadap

13 Yonatan Alex Arifianto dan Joseph Christ Santo, "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen," *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 1–14.

14 Hafer, "Where Does Obedience to Government End?"

15 Samuel Ruddy Angkouw dan Daniel Supriyadi, "Bela Negara dalam Perspektif Iman Kristen sebagai Makna Ketundukan terhadap Pemerintah," *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan* (2021).

fungsi pelayanan pemerintah, penerimaan terhadap penegakan hukum, dan ketaatan yang didasarkan pada hati nurani.

Ketundukan kepada pemerintah bukanlah kepatuhan karena rasa takut semata, melainkan ketaatan yang lahir dari kesadaran iman bahwa Allah menghendaki kehidupan yang tertib dan bertanggung jawab. Namun, ketaatan kepada pemerintah tidak bersifat mutlak. Ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, orang percaya harus mengutamakan ketaatan kepada Tuhan, yang dilakukan tanpa kekerasan dan dengan kesediaan menanggung konsekuensi secara bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, implementasi Roma 13:1–5 diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan kepada pemerintah, pembayaran pajak, partisipasi dalam pembangunan, pemeliharaan persatuan, doa bagi para pemimpin, dan kehidupan yang berintegritas. Dengan demikian, Roma 13:1–5 menolong orang Kristen menjaga keseimbangan antara identitas sebagai warga Kerajaan Allah dan tanggung jawab sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkouw, Samuel Ruddy, dan Daniel Supriyadi. "Bela Negara dalam Perspektif Iman Kristen sebagai Makna Ketundukan terhadap Pemerintah." *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2021.
- Arifianto, Yonatan Alex, dan Joseph Christ Santo. "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen." *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-5. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Foster, Stuart M. *The Reception of Romans 13:1–7 during the English Reformation*. PhD diss., University of York, 2017.
- Hafer, Carleton. "Where Does Obedience to Government End? Understanding Romans 13:1–7." *Eleutheria* 5, no. 2 (2021).
- Sine, Jefri Lorens A. "Kontekstualisasi Roma 13:1–7: Tanggung Jawab Manusia sebagai Warga Negara Indonesia untuk Membayar Pajak." *Jurnal Apokalupsis*, 2025.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339.
- Sumney, Jerry L. "Romans 13 and the Demands of Empire." *Review & Expositor* 121, no. 3–4 (2025).
- Supriadi, Made Nopen, Manase Gulo, dan Iman Kristina Halawa. "Theological Basis for Obedience to the Government During the Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 5, no. 2 (2021): 213–223.
- Susanta, Yonatan K. "Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.
- Yasinta, Priska, dan Wie Wie Chandra. "Kasih dan Takut Akan Allah sebagai Dua Pilar Sikap Patuh kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1–7." 2021.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience)." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2018): 24–36.